

BAB I

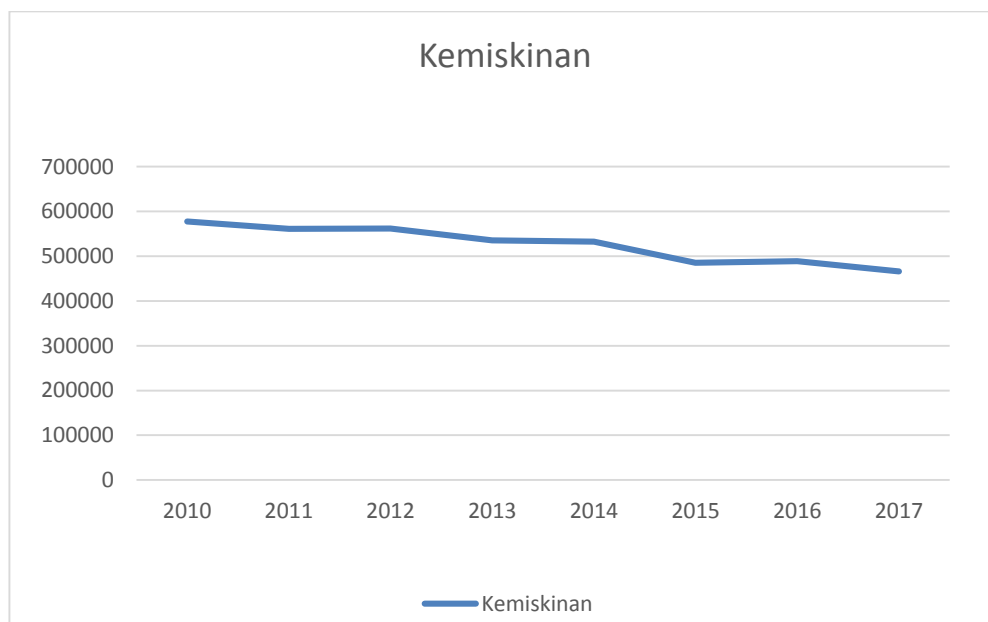
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Maka, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi aspek penting dalam agenda kebijakan pemerintah.

Banyak kebijakan yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan dan hal itu terbukti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Dari data pada Badan Pusat Statistik, angka penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 1999 sampai 2010 meskipun melambat, baik yang ada di kota maupun di desa. Penurunan tersebut adalah hasil dari perbaikan pertumbuhan ekonomi pasca krisis pada tahun 1997. Tetapi masih menjadi pertanyaan tentang penurunan angka kemiskinan di Indonesia mengingat adanya ukuran kemiskinan sifatnya multidimensi sehingga definisi dan ukurannya pun beragam.

Penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak lain dikarenakan menurunnya jumlah penduduk miskin pada tiap provinsi di Indonesia, termasuk juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang masuk dalam 10 besar daerah termiskin di Indonesia dan tertinggi se-Jawa. Gambar di bawah ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Gambar 1. 1

Jumlah Penduduk Miskin di DI Yogyakarta

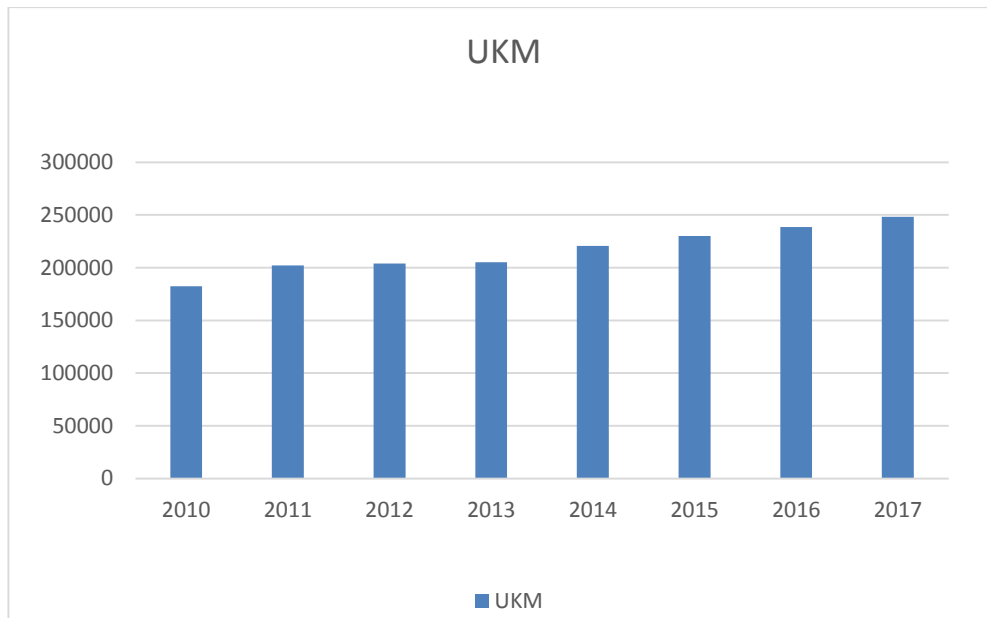
Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tersebut, pemerintah dapat menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan dan hal tersebut menjadi

tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah telah menjalankan berbagai program dan kebijakan pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun hal ini belum dapat menyelesaikan masalah sosial tersebut secara komprehensif.

Menurut Yunus (2007), pemerintah bisa saja menyelesaikan masalah sosial karena dapat melakukan banyak hal dalam kemampuannya mengakses dan mengelola sumber daya. Tetapi hal tersebut tidak sesuai kenyataannya. Beberapa alasannya yaitu pemerintah berperilaku tidak efisien, rentan terhadap korupsi, tidak mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, penyimpangan tujuan yang telah dibuat karena mereka hanya mementingkan kelompok sendiri. Kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan sosial juga dialami oleh mitra pemerintah, yaitu sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Beberapa upaya tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UKM. Menjadi sektor utama penyerapan tenaga kerja, kesuksesan UKM akan sangat memberikan pengaruh yang tinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga angka penduduk miskin mengalami penurunan. Begitupun UKM (Usaha Kecil Menengah) juga memegang peran yang sangat besar dalam meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju

pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.



Sumber: BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 1. 2

Data UKM DI Yogyakarta

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah UKM di wilayah DIY mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut diiringi dengan penurunan kemiskinan di DIY yang cukup baik setiap tahunnya. Kelemahan baik dari pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil serta dinamika masalah sosial yang semakin kompleks mendorong pada suatu pendekatan penyelesaian yang inovatif, yaitu UKM dengan konsep kewirausahaan sosial atau kita sebut dengan sociopreneurship.

Menurut Firdaus (2014), kewirausahaan sosial mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengurangan kemiskinan. Usaha menyelesaikan

masalah sosial dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan merupakan terobosan yang sangat baik. Kewirausahaan sosial merupakan gagasan perubahan sosial yang berlandaskan pada pendekatan kewirausahaan. Kewirausahaan sosial tumbuh subur seiring dalam upaya menyelesaikan berbagai macam masalah sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi disuatu keluarga adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan dapat menjadi indikator lokal untuk memonitoring pencapaian target untuk menurunkan jumlah penduduk yang pendapatannya berada di bawah standar. Upaya peningkatan kesejahteraan tercermin dalam sasaran pembangunan ekonomi prioritas pengembangan kedepan

Di Indonesia sendiri, wirausaha sosial tumbuh melesat seiring dengan harapan dan keyakinan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengatasi masalah-masalah sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) pada tahun 2009. Kewirausahaan sosial telah menjadi kajian di Indonesia, namun kajian tersebut belum memfokuskan pada masalah kemiskinan dan pembangunan ekonomi serta praktik kewirausahaan dalam bentuk bisnis sosial. Praktik kewirausahaan sosial telah melakukan peran sangat penting dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru terhadap penyakit sosial melalui gagasan atau model baru dalam bentuk pengentasan kemiskinan,

penciptaan kekayaan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, serta pendampingan hukum.

Dari grafik UKM pada gambar 1.2, menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah setiap tahunnya mengalami peningkatan, dilihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Sehingga hal ini membuat peneliti beminat melaksanakan wawancara pada APIKRI, karena target di APIKRI adalah ekspor dan menaungi usaha mikro kecil.

Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia atau biasa disebut APIKRI didirikan pada tahun 1987. APIKRI merupakan salah satu lembaga NGO yang memelopori gerakan *fair trade* melalui penguatan Perajin Mikro kecil di Yogyakarta. APIKRI yang berawal dari beberapa orang saja yaitu para pengrajin yang berjumlah 19 orang dan aktivis LSM atau aktivis sosial mereka mendampingi sampai proses produksi. Ketika selesai membuat sebuah produk yang dilakukan selanjutnya menjadi persoalan kembali, maka mereka berkumpul dengan banyak lembaga yang dahulu difasilitasi programnya PEKERTI. APIKRI didirikan dengan modal awal Rp. 180.000,00, dimana kegiatan disana termasuk dalam kegiatan kewirausahaan sosial.

Kemampuan UMKM dalam pemasaran memang salah satu yang menentukan keberhasilannya, namun di sisi lain juga kemampuan para pengrajin dalam membuat desain juga tidak kalah penting agar para konsumen semakin tertarik dengan produknya. Sebagian besar pengrajin

mempunyai kendala tersebut, dikarenakan masalah keuangan, pengetahuan dan hal lain.

Lalu, Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) bekerjasama dengan Java Learning Centre (Javlec) dan Bank BNI 46 mencoba untuk mengatasi hal tersebut dengan cara membangun sebuah Rumah Desain Apikri (RDA) yang ditujukan bagi para pengrajin yang berusaha mengembangkan desain kerajinan milik mereka. RDA merupakan sebutan populer atas Rumah Pengembangan Desain Kerajinan untuk Usaha Mikro Kecil.

APIKRI memiliki visi untuk menjadi penggerak perdagangan secara adil untuk memberdayakan komunitas kerajinan sektor mikro-kecil di Indonesia dengan misi untuk meningkatkan pengembangan kapasitas bisnis bagi produsen kerajinan mikro dan kecil, untuk memfasilitasi akses pasar bagi produsen kerajinan mikro dan kecil, untuk memperkuat kerajinan kecil mikro produsen sebagai peran dalam perekonomian nasional, serta untuk memperkokoh perdagangan yang adil sebagai alat untuk mencapai kebebasan dalam kehidupan ekonomi.

Kesuksesan sebuah lembaga atau koperasi dalam menyejahterakan anggotanya sangat dipengaruhi oleh modal, motivasi, pelatihan dan kepuasan layanan. Modal adalah hal utama yang wajib dimiliki oleh orang yang akan mendirikan usaha, baik modal dari diri sendiri maupun dari luar. Motivasi pun peranannya sangat penting, karena hal inilah yang membuat

seseorang ingin mencapai tujuannya, dalam hal ini untuk memperoleh pendapatan agar mendapat kesejahteraan. Pelatihan, seperti misalnya yang diadakan oleh APIKRI dapat membuat anggotanya lebih berwawasan misal dalam bidang desain. Juga ketika anggota APIKRI merasa puas dalam pelayanan, maka mereka akan lebih banyak berproduksi lagi sehingga akan mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraannya dan secara langsung mereka akan terhindar dari kemiskinan.

APIKRI selalu memperkenalkan tentang *fair trade*, namun di sisi lain juga menjalankan kewirausahaan sosial yang sudah mendapatkan banyak penghargaan misalnya dari Ernst and Young dan beberapa yang lain. APIKRI memang tidak pernah menyebutkan bahwa mereka menjalankan kewirausahaan sosial, namun dari praktiknya yang kemudian banyak yang mengutarakan bahwa mereka menjalankan kewirausahaan sosial tersebut. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, APIKRI bahkan sudah memakai ilmu yang jauh didepan. Ketika orang belum menjual cerita dibalik produk, mereka telah menggunakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran pendekatan kewirausahaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berupa kemiskinan dengan menggunakan konsep sociopreneur studi kasus APIKRI.

B. Rumusan Masalah

Dari perumusan masalah di atas, yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI?
2. Apakah modal berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI?
3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI?
4. Apakah kepuasan layanan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin membatasi penelitian yang akan dikaji, yaitu pembahasan hanya berfokus pada seberapa besar pengaruh sociopreneurship (kewirausahaan sosial) terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin studi kasus APIKRI di D.I. Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI.
2. Untuk mengetahui apakah modal berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI.

3. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI.
4. Untuk mengetahui apakah kepuasan layanan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin anggota APIKRI.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi civitas akademik untuk pengembangan ilmu sekarang dan yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana pengaruh sociopreneur (kewirausahaan sosial) terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin

